

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi hasil dan pembahasan di atas tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN terjadi karena ada perbedaan dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur, dimana PP RI No. 17 Tahun 2016 ini dibuat dengan dasar pertimbangan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai dan mengoptimalkan peran BUMN sebagai suatu agen pembangunan nasional dalam rangka mendukung serta mempercepat setiap agenda atau program Pemerintah, sedangkan dasar dibuatnya UU tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia, yang dalam pengelolaannya membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut harta kekayaan Negara atau harta kekayaan rakyat. Sedangkan dalam pengaturan UU tentang BUMN memerintahkan dibuatnya PP untuk melaksanakan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN, melalui PP RI No. 44 Tahun 2005 yang mana mengatur bahwa semua penyertaan modal Negara yang dananya bersumber dari APBN diatur menurut ketentuan dalam keuangan Negara, karena dana penyertaan modal Negara pada BUMN bersumber dari kekayaan

Negara yang dipisahkan dan itu melalui proses APBN, dimana berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Sehingga dalam hal ini terjadi disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara, dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya, yaitu antara PP dengan UU. Dimana di ketentuan pasal 2A ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 2016 mengatur bahwa mekanisme penyertaan modal Negara pada BUMN dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja tanpa melalui proses atau mekanisme APBN, berbeda dengan pengaturan dalam UU Keuangan Negara yaitu semua pengelolaan keuangan Negara dilakukan melalui mekanisme APBN sebagai wujud pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

2. Impikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara adalah timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dimana di Pasal 2A ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 2016 bisa dikesampingkan dikarenakan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan di atasnya yaitu UU Keuangan Negara. Hal ini didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu *lex superior derogate legi inferior* dengan maksud ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Tentunya dengan memperhatikan pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta

pembentukannya yang berlaku di Indonesia. Sebagai upaya untuk harmonisasi norma hukum terkait peraturan perundang-undangan ini agar tidak saling bertentangan, maka dapat dilakukan upaya *judicial review* ke MA sebagai lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan pengujian semua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UU terhadap UU. Harmonisasi hukum ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan hukum yang selaras dan tidak saling tumpang tindih, terkait hukum yang mengatur hal yang sama dalam tingkatan yang berbeda.

B. Saran

Didasarkan pada pembahasan dan kesimpulan, maka yang menjadi saran atau rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus lebih berhati-hati, dengan selalu memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait, baik yang sejajar maupun yang berbeda tingkatannya, agar semata-mata tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini untuk mencegah terjadi disharmoni norma hukum terkait peraturan perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup yang sama atau mengatur hal yang sejenis dan saling berkaitan antara peraturan yang satu dengan yang lain.

2. Perlu melakukan langkah strategis sebagai upaya harmonisasi hukum, berupa pengajuan *judicial review* ke MA terkait adanya disharmoni norma hukum mengenai tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara, yang diatur pasal 2A ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 2016 dengan UU Keuangan Negara. Dari konsep awal di Pasal 2A ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 2016, dan konsep Penulis untuk diajukan uji materiil (*judicial review*) ke MA menjadi sebagai berikut:

“Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”